



Available online at **FACTUM**; Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
website: <https://ejournal.upi.edu/index.php/Factum>
FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 12(1), 97-106



RESEARCH ARTICLE

RESIMEN PARA KOMANDO ANGKATAN DARAT (RPKAD) DALAM OPERASI MILITER DI INDONESIA 1959-1966

Rizqi Nuralam

Prodi Pendidikan Sejarah, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia
rizqinuralam97@gmail.com

To cite this article: Nuralam, R. (2023). Resimen para komando angkatan darat (rpkad) dalam operasi militer di indonesia 1959-1966. *FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah*, 12(1), 97-106. <https://doi.org/10.17509/factum.v12i1.25695>.

Abstract

The main problem examined in this thesis is how the Regiments of the Army Commands in Military Operations in Indonesia in 1959-1966. The research method used is a historical method consisting of four steps, namely heuristics, source criticism, interpretation and historiography. Based on the research findings, it was found that Indonesian special forces were formed due to the need for military operations in the context of eradicating the rampant rebellion movement after Indonesia's independence, Indonesia did not yet have a force that had special abilities. Then from those needs a special force was formed. In the development of special forces organizations there have been several reorganizations to perfect special forces and also special forces organizations. At first the special forces organization was called the Army Command Unit, the Army Command Regiment until now called KOPASSUS. After perfecting the organization and special forces in 1959 until 1966 Indonesian special forces had carried out various military and non-war military operations such as: Dwikora Operations wishing to return West Irian to Indonesia, Operation Trikora Confrontation that occurred between Indonesia and Indonesia Malaysia, and the September 30 / PKI Movement suppression operation that wanted to make Indonesia a Communist country.

Abstrak

Masalah utama yang dikaji dalam skripsi ini mengenai bagaimana Kiprah Resimen Para Komando Angkatan Darat Dalam Operasi Militer di Indonesia Tahun 1959-1966. Metode penelitian yang digunakan adalah metode historis yang terdiri dari empat langkah yaitu heuristik, kritik sumber, Interpretasi dan historiografi. Berdasarkan pada temuan penelitian, didapatkan hasil bahwa pasukan khusus Indonesia terbentuk karena kebutuhan dalam operasi militer dalam rangka penumpasan gerakan pemberontakan yang marak pasca kemerdekaan Indonesia, Indonesia belum memiliki sebuah pasukan yang memiliki kemampuan khusus. Maka dari kebutuhan-kebutuhan itu dibentuklah sebuah pasukan khusus. Dalam perkembangan organisasi pasukan khusus sudah terjadi beberapa reorganisasi untuk penyempurnaan pasukan khusus dan juga organisasi pasukan khusus. Pada awalnya organisasi pasukan khusus disebut dengan Kesatuan Komando Angkatan Darat, Resimen Para Komando Angkatan Darat sampai sekarang yang disebut dengan KOPASSUS. Setelah penyempurnaan organisasi dan pasukan khusus pada tahun 1959 sampai dengan 1966 pasukan khusus Indonesia telah melakukan berbagai macam operasi militer yang bersifat perang maupun non-perang operasi itu adalah: Operasi Dwikora yang ingin mengembalikan Irian Barat kedalam Indonesia, Operasi Trikora Konfrontasi yang terjadi antara Indonesia-Malaysia, dan operasi penumpasan Gerakan 30 September/PKI yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Komunis.

Article Info

Article History:
Received 23 Jun 2020
Revised 16 Jul 2022
Accepted 28 Jul 2022
Available online 01 April 2023

Keyword:

Indonesian Special Forces
Military Operation
PKAD

PENDAHULUAN

Pada tanggal 23 agustus 1949 diadakannya Konferensi Meja Bundar yang menghasilkan persekutuan Indonesia- Belanda yaitu RIS (Republik Indonesia Serikat). Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia sepenuhnya kepada Republik Indonesia Serikat tanpa syarat lagi dan tidak dapat dicabut. Karena mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pada tanggal 23 Desember 1949, Drs. Mohammad Hatta berangkat ke Belanda untuk menandatangani naskah pengakuan kedaulatan dari pemerintah Belanda. Penandatanganan dilakukan secara bersamaan, baik di Indonesia maupun Belanda pada tanggal 27 Desember 1949 (Maeswara, 2010). Dampak hasil dari KMB di bidang keamanan adalah terbentuknya APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) sebagai angkatan perang nasional RIS (Suryawan, 2013)

Masalah yang dihadapi negara pada waktu itu ialah apa yang akan dilakukan dengan tentara, inilah persoalan-persoalan yang mendominasi sebagian besar sejarah Indonesia setelah tahun 1950-an, pada tahun 1950 politisi sipil beranggapan bahwa untuk menentukan urusan militer adalah hak mereka (Ricklefs, 1981). Melihat keadaan politik yang sangat memanas, tentara mengambil sikap dengan melakukan reorganisasi dan rasionalisasi atas perintah dari kabinet yang sedang berkuasa dengan tujuan agar militer lebih baik dalam berorganisasi. Semakin matangnya angkatan bersenjata membuat kebutuhan dalam organisasi angkatan bersenjata semakin banyak. Untuk menyempurnakan organisasi di angkatan bersenjata, maka dari itu angkatan bersenjata Indonesia membentuk beberapa lembaga militer yaitu: Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut.

Angkatan bersenjata dalam hal ini sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara dari kelompok separatis yang ingin merusak kesatuan sebuah negara. Tetapi terciptanya angkatan bersenjata tidak

lepas dari problematika yang sangat Panjang dan membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit. Dalam prosesnya ketika kebijakan pimpinan nasional menunda pembentukan tentara nasional yang menyebabkan keadaan semakin kacau. Dimana terjadi pertempuran yang bersifat kedaerahan yang tidak dikelola dengan strategi yang matang sehingga banyak menimbulkan kegagalan. Oleh karena itu pemerintah memusatkan tenaga untuk merubah unit-unit militer yang berkomitmen rendah menjadi hierarki militer yang efektif (Cribb, 2010).

METODE

Peneliti menggunakan metode historis atau metode sejarah sebagai suatu cara dalam menjelaskan fenomena masa lalu yang dibantu dengan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data yang berfungsi untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Metode historis adalah suatu proses menguji, menjelaskan, dan menganalisis secara kritis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau (Gottschalk, 1986, hlm. 32). Pernyataan tersebut sama dengan pendapat Sjamsuddin (2007, hlm. 17-19) yang menyatakan bahwa metode historis merupakan suatu proses menguji dan menganalisa secara kritis dan sistematis terhadap rekaman serta peninggalan masa lampau. Begitu juga yang dipaparkan oleh Abdurahman dalam bukunya metodologi penelitian sejarah, metode sejarah merupakan penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perspektif historis (Abdurahman, 2007). Selain pendapat diatas, Daliman juga mengatakan hal serupa bahwa metode penelitian dan penelitian sejarah dengan menggunakan cara, prosedur atau teknik yang sistematis sesuai dengan asas-asas aturan ilmu sejarah (Daliman, 2010, hlm). Sedangkan menurut Kuntowijoyo (1995, hlm. 83) metode sejarah adalah cara-cara penelitian dan penelitian sejarah. Langkah-langkah dalam pemilihan topik, pengumpulan sumber, kritik intern dan ekstern, analisis dan interpretasi, dan penyajian dalam bentuk

tulisan. Adapun langkah-langkah yang akan peneliti gunakan dalam melakukan penelitian sejarah ini sebagaimana dijelaskan oleh Ismaun (2005, hlm. 50) :

1. Tahap Heuristik, yaitu pencapaian dan pengumpulan sumber sejarah yang relevan dengan penelitian (Ismaun, 2005). Secara sederhana, sumber-sumber yang didapatkan berupa : sumber benda, sumber lisan, sumber tertulis. Selain itu dapat diklasifikasikan kedalam sumber Primer dan sumber sekunder.
2. Tahap Kritik, yaitu suatu usaha memilah dan memilih sumber-sumber sejarah (Ismaun, 2005). Setelah melakukaitukan pencarian dan mengumpulkan sumber selanjutnya dilakuakn proses kritik eksternal dan kritik internal sehingga mendapatkan fakta-fakta yang kredibel.
3. Tahap Interpretasi, tahapan ini merupakan tahap setelah kritik sumber sejarah, pada tahap ini peneliti diharuskan untuk menafsirkan fakta-fakta yang ada serta menghubungkannya satu sama lain agar menjadi satu kesatuan yang utuh.
4. Tahap Historiografi, tahap ini merupakan tahapan terakhir dalam metode penelitian sejarah. Tahap ini seluruh hasil yang didapatkan peneliti dikumpulkan lalu ditulis menjadi sebuah deskripsi sejarah, yang berdasarkan pada fakta dan data yang telah melalui tahapan penelitian sebelumnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) adalah salah satu pasukan khusus yang dimiliki oleh Indonesia dalam pembentukannya memiliki sejarah yang cukup panjang, selain itu dalam perjalanan pasukan ini juga mengalami dinamika yang cukup sulit yang terus berbenah pasca kemerdekaan Indonesia. Kerja keras dan prestasi pasukan ini juga turut mewarnai bagian sejarah bangsa Indonesia (Ibrahim, 2010).

Pasukan khusus pada waktu itu sangat dibutuhkan oleh negara Indonesia, perkembangan sejarah membuktikan bahwa pasukan khusus tersebut harus dimiliki oleh Indonesia guna menumpas Gerakan separatis yang marak terjadi pada dekade tahun 1950-an (Matanansi, 2008). Kondisi yang belum stabil dalam pemerintahan menimbulkan beberapa Gerakan separatis yang menyebabkan sebuah pemberontakan yang sifatnya masih kedaerahan, maka mau tidak mau pemerintah melaksanakan operasi militer yang berdampak jatuhnya korban jiwa yang tidak sedikit dari kedua belah pihak, dari evaluasi operasi militer itulah yang memberikan ide itu membentuk sebuah pasukan yang berjumlah sedikit tetapi memiliki mobilitas yang tinggi serta efektifitas bertempur. Berikut merupakan peristiwa pemberontakan yang melatar belakangi pembentukan pasukan khusus

Sejarah pertumbuhan dan perkembangan cikal bakalnya pembentukan Pasukan Khusus Angkatan Darat Indonesia tidak lepas dari perjalanan politik-militer yang terjadi dalam negeri. Pada pertengahan April dikeluarkanlah surat Instruksi Panglima Tentara dan Teritorium III/ Siliwangi No. 55/ Instr/PDS/1952 tanggal 16 April 1952 tentang pembentukan Satuan baru bernama Kesatuan Komando TT III/Siliwangi disingkat dengan nama Kesko TT III/Siliwangi (Kopassus, 2009). Kemudian sebanyak 27 orang Perwira, Bintara, dan Tamtama di lingkungan TT III/ Siliwangi diorganikkan ke dalam Kesko TT III yang sebagian diantaranya merangkap tugas sebagai pelatih untuk melengkapi organisasi dan membantu tugas komandan Kesko TT III. Berdasarkan Surat perintah penetapan panglima pada tanggal 28 Mei 1952, personel ditambah lagi dengan empat orang bintara pelatih senjata, yaitu Serma A.J. Samin, Serma I. Permana, Serma Sumardi, dan Sersan IS Sugirin. Di bidang administrasi dan pelayanan pun ditambah 25 orang tenaga pegawai sipil a.n. Aspandi dkk. (Sihotang. dkk, 2000, hlm. 19).

Komanda pertama Kesko TT III/Siliwangi dipercayakan kepada Mayor Inf. Moch. Idjon Djanbi yang merupakan bekas tentara Belanda yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Selain menjadi komandan Idjon Djanbi merangkap jabatan sebagai pelatih. Akibat kekurangan tenaga pelatih pada tanggal 24 Mei 1952 dibuka pelatihan *Recruitering* calon pelatih komando, sebanyak 15 orang dilatih, digembleng dan diberikan pengetahuan khusus tentang pelajaran Komando, pelatihan tersebut masih diadopsi dari naskah-naskah Belanda dan Inggris yang diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia. Setelah pelatihan hampir dua bulan para calon pelatih komando dinyatakan lulus sebanyak 8 orang.

Selanjutnya panglima TT III/Siliwangi yang bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan pasukan khusus telah berjalan dengan lancar, tetapi masih terdapat beberapa kekurangan yang harus diatasi. Selama proses pembentukan Panglima TT III/Siliwangi aktif memantau dan terjun langsung ke lapangan agar bisa mengetahui kondisi sebenarnya yang dibutuhkan oleh pasukan Khusus Indonesia (Israr, 2010, hlm. 240).

Berdasarkan Surat keputusan KSAD No. 3/KSAD/KPTS/53 pada tanggal 14 Januari 1953 menetapkan bahwa Kesatuan Komando Teritorium dan Tentara III/ Siliwangi dialih statuskan dari panglima TT III/Siliwangi kepada KSAD. Kemudian namanya diganti menjadi Kesatuan Komando Angkatan Darat disingkat KKAD (Sihotang, dkk, 2000, hlm.19). kemudian Inf. Mayor Moch. Idjon Djanbi ditunjuk sebagai komandan KKAD, pada saat menjabat sebagai komandan Kesko III/Siliwangi Inf. Mayor Idjon Djanbi sudah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kesatuan tersebut. Meskipun serba keterbatasan dengan Pendidikan dan keahlian yang dimiliki beliau berhasil meletakkan prinsip-prinsip dasar pembentukan satuan komando yang tangguh (Disjarahad, 2015, hlm. 35).

Ditengah kepemimpinannya sebagai Komandan KKAD Mayor Idjon Djanbi

menetapkan program untuk menambah jumlah tenaga pelatih inti prajurit komando melalui Pendidikan. Untuk membedakan satuan komando dengan kesatuan lain Mayor Idjon Djanbi menyarankan baret merah kecoklatan sebagai baret kesatuan KKAD (Disjarahad, 2015).

Sementara itu KKAD semakin mengembangkan organisasinya untuk melaksanakan beban tugas yang semakin meningkat, baik dalam tangkap tugas operasi maupun tugas Pendidikan dan latihan. Upaya ini memperoleh dukungan berkat semakin banyaknya personel KKAD yang memiliki kualifikasi komando. Dalam hal ini tujuan Pendidikan komando adalah mendidik perwira, bintara, dan tamtama infanteri sehingga memiliki kecakapan dan kemahiran untuk dapat melaksanakan tugas khusus dalam rangka organisasi komando.

Pada tanggal 25 Juli 1955, melalui surat keputusan Panglima Menteri Pertahanan No. 259/KTPS/1955 KKAD ditingkatkan dan diresmikan menjadi Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD). Pada upacara peresmian Wakil Presiden Drs. Moh. Hatta atas nama panglima Tertinggi bertindak sebagai inspektur upacara. Demi kelancaran fungsi Pendidikan komando disamping tugas-tugas tempur, maka dibentuklah sebuah wadah Pendidikan organisasi RPKAD yang diberi nama Sekolah Pasukan Komando Angkatan Darat (SPKAD) (Disjarahad, 2015). Dalam upacara tersebut juga Mayor Idjon Djanbi dipercaya kembali untuk menjadi komandan satuan tersebut dengan R.E Djaelani sebagai wakilnya.

Kemudian pada tanggal 26 Oktober 1959 dengan dilengkapi kemampuan para pada semua pasukan Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat. Maka secara organisasi dirubah nama dari istilah “pasukan” menjadi “para” sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, sehingga terjadi perubahan dari Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat menjadi Resimen Para Komando Angkatan

RIZQI NURALAM
RESIMEN PARA KOMANDO ANGKATAN DARAT (RPKAD) DALAM OPERASI MILITER DI
INDONESIA 1959-1966

Darat disingkat dengan RPKAD. Demikian juga dengan Sekolah Pasukan Komando Angkatan Darat dirubah menjadi Sekolah Para Komando Angkatan Darat (SPKAD) (Disjarahad, 2015).

Berdasarkan surat keputusan KASAD No. KPTS/1637/12/1959, pada tanggal 21 Desember 1959 diadakan pemisahan unsur tempur dan unsur Pendidikan (Sihotang. dkk, 2000). Lokasi Pendidikan tetap menempati Kompleks Pendidikan di Batujajar, sedangkan unsur tempur Resimen Para Komando Angkatan Darat secara berturut-turut di pindahkan ke Cijantung Jakarta. Kegiatan Pendidikan komando beralih status dari Resimen para Komando Angkatan darat kepada Pusat Infanteri/Komando Pendidikan dan Latihan (Kopassus, 2009). Setelah SPKAD berada dalam naungan Pusat Infanteri, pada tahun 1959 dilaksanakan pergantian Komandan SPKAD dari Kapten Wiyogo kepada Mayor Sarwo Edhie Wibowo yang sebelumnya bertugas di Akademi Militer Magelang. Pada masa kepemimpinannya SPKAD Batujajar mengalami banyak perubahan mencakup masalah peningkatan Kurikulum maupun dalam jenis-jenis Pendidikan dan pelatihan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan prajurit Para Komando.

Dalam perjalanan sejarahnya, dilakukan perubahan organisasi RPKAD, dimana secara organisasi menempatkan RPKAD selain Sebagai Badan pelaksana pusat sekaligus juga sebagai badan Pembina fungsi dan satuan Para Komando. Kemudian singkatan nama Resimen Para Komando Angkatan Darat Pernah berubah menjadi Menparkoad pada tanggal 16 Juni 1962 juga dengan singkatan Sekolah Para Komando Angkatan Darat dirubah menjadi Separkoad dan baik secara organik maupun administrasi berada dibawah Menparkoad.

Dalam peran menjaga keamanan dan pertahanan yang mengancam keutuhan NKRI baik dari dalam maupun luar. Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) memiliki andil yang sangat besar di mulai dari tahun 1950-an karena berkat di bentuknya

Pasukan Komando ini memberikan perubahan yang sangat besar bagi militer Indonesia. Pembentukan pasukan ini diakibatkan kebutuhan Indonesia untuk memiliki pasukan khusus. Karena melihat negara-negara yang lain sudah memiliki pasukan yang dibekali dengan kemampuan khusus.

Salah satu peran Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) dalam menjaga keamanan Indonesia dibuktikan dengan operasi-operasi militer yang telah dilakukan oleh Pasukan Komando ini, seperti dalam penumpasan pemberontakan PRRI dan Permesta yang dimana dilakukan beberapa operasi militer diantaranya operasi Tegas, operasi 17 Agustus, Operasi Sapta Marga, Operasi Sadar. Serta Operasi-operasi Militer lainnya yang bertujuan untuk menjaga kesatuan dan keutuhan NKRI.

Dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 17 Agustus 1961 presiden Soekarno telah menegaskan garis-garis perjuangan bangsa Indonesia yang telah bertekad untuk membebaskan Irian Barat dengan kekuatan bersenjata, setelah 10 tahun lebih jalan damai melalui perundingan selalu menemui kegagalan (Disjarah AD, 2015). Pada tanggal 19 Desember 1961 dalam suatu rapat umum di Yogyakarta presiden Soekarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat yang isinya perintah untuk mengagalkan negara Papua bikinan Belanda mengibarkan bendera Merah Putih di Irian Barat dan bersiap mobilisasi umum (Sihotang. dkk, 2000).

Trikora yang diumumkan serentak di seluruh tanah air, disambut oleh rakyat dengan penuh semangat. Seruan pemerintah untuk memanggil pemuda menjadi sukarelawan pembebasan Irian Barat disambut oleh ribuan pemuda yang mendaftarkan diri (Disjarah AD, 2015). Kebutuhan tersebut untuk mengimbangi kekuatan militer Belanda. Pasukan tersebut harus mampu mengadakan penyusupan ke daerah musuh untuk melakukan gerilya dan serangan yang mengakibatkan kerugian besar bagi pihak musuh dan kemudian segera menghilang.

Sejak dicetuskannya Tri Komando Rakyat serta disusunnya Komando Mandala pembebasan Irian Barat, maka Angkatan Bersenjata Republik Indonesia telah meningkatkan pengawasan dan pengintaian di perbatasan wilayah Republik Indonesia dengan Irian Barat yang dikuasai Belanda. Patroli-patroli perbatasan dilakukan oleh AURI, ALRI Bersama pasukan-pasukan Angkatan darat. Hasil pengintaian Angkatan Udara Mandala menunjukkan Kaimana diperkuat antara lain dengan satu kapal fregat, satu kapal perusak, satu kapal selam, dan pesawat tempur Neptune, selain satu batalyon pasukan Marinir (Pamungkas, 2015).

Komando Mandala kemudian melancarkan operasi-operasi penyusupan gerilyawan ke daerah Irian Barat Melalui Laut dan Udara. Untuk mendukung penyusupan yang dilakukan oleh para gerilyawan tersebut, maka Komando Mandala telah melancarkan beberapa gelombang operasi militer untuk mendaratkan pasukan-pasukan TNI di Irian Barat.

Operasi Komando Mandala dilakukan dalam tiga fase yaitu infiltrasi, eksploitasi, dan konsolidasi. Pada fase eksploitasi operasi Komando Mandala telah ditetapkan beberapa sasaran pokok serangan terbuka seperti Fakfak, Sorong, Kaimana, Jayapura, dan Merauke (Imparsial, 2011). Kaimana kemudian menjadi sasaran dari berbagai operasi militer dalam tiga fase tersebut lewat berbagai matra baik darat, laut, dan udara.

Pada tanggal 5 Oktober 1962 pemerintah RI membuka perwakilan resimen di Irian Barat di bawah Pimpinan Sujarwo Tjondro Negoro, SH untuk mempersiapkan menerima kekuasaan atas wilayah Irian Barat. Pada tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia dikibarkan berdampingan dengan bendera PBB di kota Baru. Peristiwa ini dihadiri oleh Menpangad Letjen TNI A. Yani beserta rombongan pemerintah dan TNI. Pada tanggal 1 Mei 1963 tibalah saat-saat yang dinantikan oleh bangsa Indonesia sejak diproklamasikan 17 Agustus 1945 yaitu keutuhan Negara Republik

Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Pada saat itu UNTEA menyerahkan secara resmi kekuasaan Irian Barat kepada Indonesia (Disjarahad, 2015).

Dwi Komando Rakyat (DWIKORA) merupakan suatu kebulatan tekad politik konfrontasi terhadap pembentukan negara federasi Malaysia yang didukung oleh Inggris. Pembentukan Unifikasi Malaysia menjadi pemicu pertikaian Indonesia dengan Malaysia. Soekarno beranggapan pembentukan Federasi Malaysia adalah proyek neo-kolonialisme (Nekolim) Inggris yang dapat membahayakan revolusi Indonesia (Sekretariat Negara RI, 1981).

Pembentukan Federasi Malaysia atau lebih dikenal dengan persekutuan Tanah Melayu. Pada tahun 1961 Federasi Malaysia menggabungkan Brunei, Sabah, dan Sarawak kedalam wilayahnya. Hal ini tidak sesuai dengan Persetujuan Manila, maka keinginan itu ditentang oleh Presiden Soekarno. Soekarno menganggap pembentukan Federasi Malaysia yang sekarang dikenal sebagai Malaysia sebagai "boneka Inggris" yang merupakan kolonialisme dan imperialisme dalam bentuk baru. Dukungan terhadap berbagai gangguan keamanan dalam negeri dan pemberontakan di Indonesia (Kusmayadi, 2017).

Daerah Malaysia bagi Inggris ialah tempat dimana terdapat kepentingan-kepentingan ekonomi Inggris memiliki arti maupun jumlah, di samping kepentingan Inggris di bidang ekonomi, dan terutama strategi pertahanan Inggris, daerah Malaysia merupakan salah-satu mata rantai yang penting dari pada garis pertahanan-pertahanan Inggris yang membentang dari Inggris melalui Gibraltar dan Aden terus ke Singapura sampai ke New Zealand. (Disjarah TNI AD, 1972)

Berhubungan dengan hal itu, maka Pemerintah RI menarik beberapa kesimpulan tentang mengapa Inggris sangat mendukung rencana pembentukan Malaysia, yakni Malaysia oleh Inggris direncanakan untuk dijadikan wilayah yang menjamin kelangsungan kepentingan-kepentingan

RIZQI NURALAM
RESIMEN PARA KOMANDO ANGKATAN DARAT (RPKAD) DALAM OPERASI MILITER DI
INDONESIA 1959-1966

Inggris di bidang ekonomi, pertahanan, serta Malaysia diperkirakan akan tetap berhaluan pro Barat. (Hadiningrat, 1971)

Pada tanggal 24 September 1965 satu tim RPKAD di bawah pimpinan Letkol Kentot H meninggalkan Lapangan Terbang Halim Perdanakusumah menuju daerah operasi Kalimantan Timur dengan menggunakan pesawat Hercules T-1306. Pesawat yang dikemudikan oleh Mayor Udara Suharjo itu yang menerjunkan tim RPKAD ke pebatasan Kalimantan Timur, tetapi karena cuaca buruk Letkol Kentot H kemudian tidak jadi diterjunkan kemudian ada perintah mendadak dari Komandan RPKAD untuk segera kembali ke Jakarta, karena adanya pergolakan politik di Jakarta menjelang pemberontakan G 30 S/PKI. Kemudian cara penyelesaian konfrontasi tersebut dengan keluarnya Surat perintah 11 Maret, maka Indonesia menempuh penyelesaian persengketaan dengan persengketaan dengan Malaysia secara damai dan terhormat. Usaha tersebut melahirkan adanya Jakarta Accord pada tanggal 11 Agustus 1966.

Menjelang meletusnya pemberontakan G 30 S/PKI, situasi politik dalam negeri diliputi oleh suasana yang panas dimana saling tuduh menuduh dan fitnah yang dilancarkan oleh PKI terhadap lawan politiknya dan juga terhadap TNI AD dan tokoh-tokoh pimpinan Angkatan Darat yang sudah lama anti PKI. Setelah berhasil mempengaruhi pemerintah Presiden Soekarno yang dimulai dengan "Manifesto politik" dengan berbagai aspek politis yang berbau komunis seperti ide Demokrasi Terpimpin yang kemudian dikenal dengan ideologi "Nasakom", maka dengan adanya ideologi tersebut PKI semakin gencar melakukan aksinya dengan memfitnah dan menuduh terhadap TNI/ABRI. Pada mulanya PKI menuduh bahwa Angkatan Darat Ingin melakukan kudeta terhadap pemerintahan Soekarno dengan tuduhan tersebut PKI berargumen bahwa di dalam TNI AD terdapat sebuah Dewan yang disebut oleh PKI "Dewan Jendral". Kemudian disangkal langsung oleh Letnan Jendral Ahmad Yani selaku pimpinan

Angkatan darat dengan tuduhan tersebut tidak benar.

Pada tanggal 30 September 1965 PKI mempersiapkan rencana yang akan dilakukan dan pada tanggal 1 Oktober 1965 bergeraklah pasukan dari Resimen Cakrabirawa Pengawal Istana dari Lubang Buaya. Gerakan tersebut dimulai pada pukul 03.00 pagi telah dilakukan penculikan-penculikan terhadap beberapa orang perwira tinggi AD seperti Letjend Ahmad Yani, Brigjend D. I. Pandjaitan, Mayjend Suprpto, Mayjend Harjono M. T., Brigjend Sutojo, Mayjend S. Parman (Pusat penerangan AD, 1965). Gerakan rencana kudeta yang menamakan dirinya Gerakan 30 September tersebut juga telah melakukan usaha penculikan terhadap Menko Hankam/Kasab Jenderal A. H. Nasution namun gagal. Kegagalan penculikan tersebut dikarenakan Jenderal A. H. Nasution mendapat bantuan dari ajudannya, Lettu Piere Tendean, yang berhasil melarikan diri dengan cara melompat pagar rumahnya.

Kemudian disusul dengan pengumuman sebuah dekrit mengenai pembentukan sebuah dewan yang mereka namakan dengan Dewan Revolusi Indonesia dibawah pimpinan Letkol Untung, Komandan Batalyon Kawal Kehormatan Istana Resimen Cakrabirawa, yang disiarkan pada tanggal 1 Oktober 1965 pagi hari melalui RRI Jakarta (Disjarahad, 2015). Letnan Kolonel Untung mengeluarkan dekrit tersebut sebagai Komandan Komando Gerakan 30 September dengan wakil komandan seperti Brigadir Jenderal Supardjo, Kolonel Laut Sunardi, Letnan Kolonel Heru Atmodjo, dan Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas. Keseluruhan anggota yang tercantum dalam susunan Dewan Revolusi Keputusan No. 1 berjumlah 45 orang (Komando Operasi Tertinggi, 1965).

Akibat dari hal tersebut pihak Militer AD tentu tidak tinggal diam, Mayor Jenderal Soeharto langsung mengambil tindakan dengan cara menggerakkan pasukan Kostrad serta kesatuan-kesatuan yang tidak mendukung Gerakan 30 September seperti

RPKAD. Sarwo Edhie yang ketika itu menjabat sebagai Komandan RPKAD mendapat tugas dari Pangkostrad Mayor Jenderal Soeharto untuk melakukan penyerbuan dalam upaya merebut kembali gedung RRI dan Kantor telekomunikasi yang telah dikuasai oleh Gerakan 30 September (Subroto, 2009).

Rencana untuk merebut kembali Gedung RRI dan Kantor Telekomunikasi sudah di persiapkan yang disusun oleh Mayor Jendral Soeharto dan Sarwo Edhie serta staf yang lainnya yang berada di Markas Kostrad. Dua kompi pasukan Sarwo Edhie mulai melakukan pergerakan operasi perebutan Gedung RRI dan Kantor Telekomunikasi. Pasukan Sarwo Edhie sebelum berangkat telah diberi pesan oleh Mayor Jenderal Soeharto bahwa dalam upaya mengambil alih sebisa mungkin menghindari terjadinya pertumpahan darah. Menjelang maghrib, kompi Kapten Heru menyerang Kantor Telekomunikasi, sedangkan kompi Kapten Urip menyerbu Gedung RRI (Redaksi Tempo, 2012, hlm. 4). Tanpa perlawanan yang berarti, pasukan RPKAD berhasil menduduki Gedung RRI dan pusat Telekomunikasi.

SIMPULAN

Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) adalah pasukan khusus Angkatan Darat yang mempunyai sejarah panjang. Dalam perjalanannya pasca kemerdekaan Indonesia yang belum memiliki Angkatan bersenjata dan juga kebutuhan pasukan khusus yang sangat diperlukan oleh Indonesia. Karena pada waktu itu Indonesia belum memiliki pasukan khusus. Karena keadaan Indonesia masih belum stabil, pada tahun 1950-an banyak terjadi gerakan sparatis yang ingin mendirikan negaranya sendiri. Melihat kondisi negara yang sedang terancam dengan maraknya pemberontakan membuat pemerintah mau tidak mau harus melakukan operasi militer yang menimbulkan dampak jatuhnya korban jiwa dari kedua belah pihak. Dari evaluasi operasi militer tersebut memunculkan ide pembentukan pasukan khusus. Pasukan khusus yang berjumlah

sedikit tetapi memiliki mobilitas tinggi serta efektif dalam menjalankan operasi.

Pasukan Khusus Angkatan Darat Indonesia mulai terbentuk akibat dilatar belakangi dinamika politik-militer dalam negeri. Kemudian Pertengahan bulan dikeluarkanlah surat Instruksi Panglima Tentara dan Teritorium III/ Siliwangi No. 55/Instr/PDS/1952 tanggal 16 April 1952 tentang pembentukan Satuan baru bernama Kesatuan Komando TT III/ Siliwangi disingkat dengan nama Kesko TT III/Siliwangi. Komandan pertama Kesko TT III/Siliwangi dipercayakan kepada Mayor Inf. Moch. Idjon Djanbi yang merupakan bekas tentara benlanda yang sudah menjadi warga negara Indonesia.

Akibat keperluan untuk menjaga pertahanan dan keamanan maka pemimpin TNI AD mengeluarkan surat perintah untuk membentuk pasukan khusus yang cakupannya Nasional. Maka kedudukan satuan komando yang awalnya di pegang oleh TT III/ Siliwangi di ambil alih langsung oleh KSAD. Kemudian menindak lanjuti perintah tersebut dikeluarkanlah Surat keputusan KSAD No. 3/KSAD/KPTS/53 pada tanggal 14 Januari 1953 menetapkan bahwa Kesatuan Komando Teritorium dan Tentara III/ Siliwangi dialih statuskan dari panglima TT III/Siliwangi kepada KSAD. Kemudian namanya diganti menjadi Kesatuan Komando Angkatan Darat disingkat KKAD.

Sementara itu KKAD semakin mengembangkan organisasinya untuk melaksanakan beban tugas yang semakin meningkat, baik dalam tangkap tugas operasi maupun tugas Pendidikan dan latihan. Upaya ini memperoleh dukungan berkat semakin banyaknya personel KKAD yang memiliki kualifikasi komando. Pada tahun 1955 KKAD ditingkatkan dan diresmikan menjadi Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat (RPKAD). Demi kelancaran fungsi Pendidikan komando disamping tugas-tugas tempur, maka dibentuklah sebuah wadah Pendidikan organisasi RPKAD yang diberi nama Sekolah

RIZQI NURALAM
RESIMEN PARA KOMANDO ANGKATAN DARAT (RPKAD) DALAM OPERASI MILITER DI
INDONESIA 1959-1966

Pasukan Komando Angkatan Darat (SPKAD). Pada upacara peresmian ditunjuk sebagai komandan RPKAD yaitu Mayor Idjon Djambi dan wakil komandan Mayor. R.E Djaelani.

Kemudian pada tanggal 26 Oktober 1959 dengan dilengkapi kemampuan para pada semua pasukan Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat. Maka secara organisasi dirubah nama dari istilah "pasukan" menjadi "para" sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, sehingga terjadi perubahan dari Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat menjadi Resimen Para Komando Angkatan Darat disingkat dengan RPKAD. Demikian juga dengan Sekolah Pasukan Komando Angkatan Darat dirubah menjadi Sekolah Para Komando Angkatan Darat (SPKAD).

Sebagai pasukan khusus RPKAD tentunya memiliki tugas untuk menjalankan operasi militer salah satunya operasi militer yang pernah dilaksanakan oleh RPKAD dalam kurun waktu 1959 sampai dengan 1966 yaitu, operasi Tri Komando Rakyat (TRIKORA), operasi Dwi Komando Rakyat (DWIKORA), dan operasi penumpasan Gerakan 30 September/ PKI

Dalam pergantian para komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat yang pada awalnya komandan pertama Mayor Idjon Djanbi yang merupakan seorang mantan pasukan Belanda yang beralih kewarganegaraan menjadi Indonesia. Kemudian digantikan oleh Mayor R. E. Djaelani yang sebelumnya menjadi wakil Komandan Resimen Para Komando tetapi tidak berselang lama digantikan kembali oleh Mayor Kaharudin Nasution. Kemudian diganti kembali oleh Letkol Moeng Parhadimulyo. Selanjutnya digantikan oleh Sarwo Edhie Wibowo yang mempunyai jasa yang besar terhadap perkembangan pasukan khusus dan juga dalam operasi-operasi militer yang pernah dilakukan oleh Resimen Para Komando Angkatan Darat.

REFERENSI

Abdurahman, D. (2007). *Metodologi penelitian sejarah*. Ar-Ruzz Media Group.

- Criib, R.B. (2010). *Para jago kaum revolusioner 1945-1949*. Masup Jakarta.
- Daliman, A. (2012). *Metologi penelitian Sejarah*. Ombak.
- Disjarah TNI AD. (2015). *59 th kopassus mengabdikan untuk nkri*. Cipta Graha Kreasi.
- Disjarah TNI AD. (1972). *Cuplikan sejarah perjuangan tni angkatan darat*. Fakta Mahjuma.
- Gottschalk, L. (2008). *Mengerti sejarah*. Universitas Indonesia Press.
- Ibrahim, Ipung. (2010). *Indonesian special forces, pasukan khusus indonesia*. Mata Padi Pressindo.
- Imparsial. (2011). *Sekuritisasi papua, implikasi pendekatan keamanan terhadap kondisi ham di papua*. Imparsial
- Ismaun. (2005). *Sejarah sebagai ilmu*. Historia Utama Press.
- Israr, Hikmat. (2010). *Kolonel alex kawilarang untuk sang merah putih*. Pustaka Sinar Harapan.
- Komando Operasi Tertinggi. (1965). *Tjataan kronologis di sekitar peristiwa g30s*. Seksi Penerangan.
- Kopassus. (2009). *Lintas sejarah pusdikpassus periode 1952-2009*. Kopassus.
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar ilmu sejarah*. Yogyakarta: Bentang.
- Kusmayadi, Yadi. (2017). *Politik luar negeri republik indonesia pada masa konfrontasi indonesia-malaysia tahun 1963-1966*. *Jurnal Artefak: History and Education*, 4(1), 23-3.
- Kusumah, Hadiningrat. (1971). *Sedjarah operasi-operasi gabungan dalam rangka dwikora*. Departemen Pertahanan dan Keamanan, Pusat Sedjarah ABRI.
- Maeswara, Garda. (2010). *Sejarah revolusi indonesia 1945-1950*. Narasi.
- Matanansi, Petrik. (2008). *Pasukan khusus pengukir sejarah di indonesia*. Media Pressindo.
- Pamungkas, Cahyo. (2015). *Sejarah lisan integrasi papua ke indonesia : pengalaman orang kaimana pada masa trikora dan*

- pepera. *Jurnal Paramita*. 25(1), 88-108.
<https://doi.org/10.15294/paramita.v25i1.3423>.
- Redaksi Tempo. (2012). *Sarwo edhie wibowo dan misteri 1965*. Jakarta: Gramedia.
- Ricklefs. M.C (1981). *Sejarah Indonesia Modern*. UGM Press.
- Sekretariat Negara RI. (1981). *30 Tahun indonesia merdeka. 1950-1964*. Citra Lamtoro Gung Persada.
- Sihotang, K. joy. dkk. (2000). *Pengabdian korps baret merah abad xx*. Kopassus.
- Sjamsuddin, Helius. (2007). *Metodologi sejarah*. Ombak.
- Subroto, Hendro. (2009). *Sintong panjaitan: perjalanan seorang prajurit para komando*. Kompas.
- Suryawan, A. (2013). Peran apris dalam menjaga stabilitas keamanan dan keutuhan ris tahun 1949-1950. *E-jurnal Pendidikan Sejarah*. 1(1), 1-6.